



Analisis Manajemen Pengelolaan Logistik Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi

Widy Susanti Abdulkadir¹, Madania², Teti S. Tuloli³, Nur rasdianah⁴, Juliyanty Akuba^{5*}

^{1,2,3,4,5} Jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo

*E-mail: widy@ung.ac.id

Article Info:

Received : 27 Desember 2021

in revised form : 28 Januari 2022

Accepted : 19 Februari 2022

Available Online : 1 Maret 2022

Keywords:

Management

Medicine

IFKG

Corresponding Author:

Wahyuni Ahmad

Jurusan Farmasi

Fakultas Olahraga dan

Kesehatan

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail:

yuniahmad71@gmail.com

ABSTRACT

Drug management is a set of optimally conducted activities related to the aspects of drug planning, procurement, storing, distribution, and extermination. This was done to achieve the proper drug amount, types, supply, maintenance, and medication. Earlier observstion revealed problems in managing pharmaceutical stock and consumables, where some of the stocks are empty. This qualitative descriptive research focus on identifying pharmaceutical logistic stock and health supplies comprising drug planning, procurement, storing, distribution, and extermination in the pharmaceutical unit of Gorontalo. The primary data were obtained from questionnaires based on technical guidance by the health ministry while the secondary were obtained from related documents. Based on the findings, the pharmaceutical stock planning and storing process at the pharmacy unit did not meet the health ministry standards, which is opposite to the procurement, distribution, and extermination process.



Copyright © 2022 IJPE-UNG

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

How to cite (APA 6th Style):

Abdulkadir.W.S.,Madania.,Tuloli.T.S.,Rasdianah.N.,Akuba.J. (2022). *Analisis Manajemen Pengelolaan Logistik Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo*. Indonesian Journal of Pharmaceutical (e-Journal), 2(1), 74-85.

ABSTRAK

Manajemen pengelolaan obat adalah susunan kegiatan yang dilaksanakan secara optimal dan berhubungan dengan aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi serta pemusnahan obat agar kebenaran banyaknya juga macam pembekalan perawatan serta pengobatan dapat tercapai. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, masih terdapat masalah terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dimana masih terdapat kekosongan dari ketersediaannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pengelolaan logistik sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemusnahan di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan desain pengamatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data primer diperoleh dari angket berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kemenkes, dan data sekunder berasal dari penelusuran dokumen. Berdasarkan hasil yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa pada proses perencanaan dan penyimpanan sediaan farmasi di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes, sedangkan proses pengadaan, pendistribusian dan pemusnahan sudah sesuai dengan standar Kemenkes.

Kata Kunci: Pengelolaan, Obat, IFKG

1. Pendahuluan

Obat merupakan berbagai bahan tunggal maupun campuran yang berfungsi untuk pencegahan, meringankan, ataupun untuk penyembuhan penyakit dan dipakai oleh manusia untuk bagian luar maupun bagian dalam tubuh [13]. Obat memerlukan berbagai perlakuan khusus dalam hal pengelolaan dikarenakan sifatnya seperti tidak tahan terhadap panas, cahaya, maupun hal-hal sensitif yang dapat mengganggu kestabilan obat tersebut. Tidak hanya obat, dalam menjamin terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik, maka diperlukan alat kesehatan yang sering digunakan untuk memeriksakan pasien, sebagai alat bantu untuk melaksanakan intervensi kesehatan terhadap pasien, utamanya dalam mendiagnosis keluhan penyakit yang dialami pasien. Oleh karenanya, pengolahan persediaan farmasis serta pembekalan perawatan selalu terdapat apresiasi lebih.

Manajemen pengelolaan obat adalah susunan kegiatan yang dilaksanakan secara optimal dan berhubungan dengan aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi serta pemusnahan obat agar kebenaran banyaknya juga macam pembekalan perawatan serta pengobatan dapat tercapai. Hal tersebut dilaksanakan agar layanan perawatan utama terhadap manusia yang memerlukan dapat terpenuhi. Tujuannya dalam kegiatan ini yaitu bisa menjaga kecukupan, persamaan, serta terjangkaunya sediaan pengobatan dalam macam serta banyaknya ketepatan agar dapat didapatkan dengan mudah, selain itu bagi kabupaten/kota adalah untuk mewujudkan terlaksananya optimasi penggunaan dana melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan obat secara tepat dan benar. Karenanya, pengelolaan obat harus dilakukan secara sesuai, efektif, serta efisiensi [11, 2].

Dalam manajemen pengelolaan obat, hal pertama yang dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan pertama dalam uraian tahapan manajemen yang membutuhkan penjelasan pada timbangannya serta belum bisa mengandalkan perkiraan juga harapan semata. bertujuan dalam penentuan macam serta banyaknya pengobatan serta pembekalan kesehatan dengan tepat serta berdasarkan dengan keinginan dalam layanan utama perawatan. Setelah perencanaan, maka obat yang telah direncanakan akan dilakukan pengadaan. Pengadaan ialah tahapan dalam

menyediakan obat yang diinginkan dalam Unit layanan Kesehatan. Mengadakan obat juga pembekalan perawatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan dalam ketetapan pada pelaksanaan penentuan Barang/ Jasa Instansi Pemerintahan serta Pelaksanaan batasan perolehan juga Belanja Negara. Lalu tahap selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan adalah salah satu cara mengamankan obat-obatan yang didapatkan supaya terjaga (tidak hilang), dijauhkan dari produk fisik serta kimiawi juga mutunya selalu dijamin. Tujuannya diantaranya adalah untuk menjaga mutu obat dari kerusakan karena tidak sesuai dalam penyimpanan, memudahkan pencarian di gudang, mencegah kehilangan obatm memudahkan stock opname dan pengawasan. Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi merupakan salah satu rangkaian agenda pada rangkaian keluaran dan masukan obat, dijamin keabsahannya, ketepatan jenis serta jumlah secara merata juga teratur dalam pemenuhan kebutuhannya dalam bagian layanan perawatan. Setelah itu adalah proses pencatatan dan pelaporan. Lalu proses pemusnahan obat yang dilakukan dengan memusnahkan obat obat yang sudah ekspire, diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, belum memenuhi persyaratan dalam penggunaannya, pembatalan izin peredaran, serta berkaitan dengan tindakan pidana [1, 3, 5, 15].

Instalasi Farmasis Pemerintah yaitu sebuah sarana penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasis serta peralatan kesehatan dari Pemerintahan, entah itu Pemerintahan Pusat ataupun Pemerintahan Daerah, Tentara Nasionalis Indonesia/ Kepolisian, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah pada agenda layanan kesehatan, terdapat pada Undang-Undang tentang narkotika juga psikotropika dinamakan sarana simpanan sediaan farmasis pemerintahan. Salah satu instalasi farmasi yang terdapat di Gorontalo adalah Instalasi Farmasi Kota Gorontalo. Instalasi Farmasi Kota Gorontalo merupakan instalasi farmasi yang memiliki tugas untuk melakukan manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang ada di Kota Gorontalo secara keseluruhan dimulai dari perencanaan hingga pemusnahan [4, 7].

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramukantoro dan Sunarti [10], tentang pengevaluasian pengolahan pengobatan pada Instalasi Farmasis Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015 dikemukakan bahwa pada tahap distribusi dan penggunaan pengelolaannya belum memenuhi indikator standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO. Dari total 17 puskesmas yang ada, hanya 5 puskesmas yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemenkes dan WHO. Penyebabnya adalah perbedaan sistem pendistribusian dengan indikator dimana instalasi farmasi seharusnya merencanakan pendistribusian obat keseluruh puskesmas yang ada di Kota Surakarta, tetapi Instalasi Farmasi Surakarta hanya menunggu surat permintaan dari puskesmas terkait.

Pada pengamatan yang dilaksanakan oleh Rumbay dkk [12], tentang analisa dalam rencana pengobatan dalam Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara diperoleh dimana tahapan rencana pemenuhan pengobatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sama dalam tuntutan Teknisi Pengolahan serta mengadakan pengobatan Publik juga Pembekalan Kesehatan yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kekurangan staf farmasis, sedikitnya koordinasi dalam sistem rencana juga pelaksana agenda monitoring juga evaluasi yang belum optimal.

Penelitian ini memiliki maksud untuk mengetahui pengolahan pengobatan serta pembekalan perawatan secara keseluruhan pada Instalasi Farmasi berdasarkan

ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang mencakup seluruh kegiatan pengelolaan dimulai dari perencanaan hingga pemusnahan dengan menelusuri informasi pengelolaan obat, wawancara, dan pengisian kuisioner penelitian yang berdasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, masih terdapat masalah pengelolaan obat maupun Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dimana masih terdapat kekosongan dari ketersediaannya. Kekosongan ini terjadi dikarenakan keterlambatan dalam pengadaan obat seperti keterlambatan pengiriman dari penyedia obat, termasuk pada obat program dan disediakan langsung oleh pemerintah pusat, jika mengalami kekosongan, maka akan terjadi kekosongan juga pada Instalasi Daerah. Sehingga perlu dilakukan penelitian ini lebih lanjut dengan menganalisis dan melihat pengelolaan obat di Instalasi Farmasi secara keseluruhan.

2. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Pengamatan ini menggunakan desain pengamatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana data primer yang diperoleh dari angket berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan dan distandarisasi oleh Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen instalasi farmasi seperti dokumen perencanaan pengadaan obat, laporan permintaan obat dari puskesmas, laporan pendistribusian obat, laporan kekosongan obat, laporan obat kadaluarsa, laporan penarikan obat, laporan pemusnahan obat, serta laporan akhir.

Metode Pengambilan Data

Mengambil hasil dilaksanakan dalam pengisian lembar angket yang akan diisi langsung oleh peneliti dengan pertimbangan sesuai dengan yang tertera dalam angket, wawancara, serta pencarian data melalui arsip laporan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemusnahan atau penarikan, catatan serta laporan perbekalan farmasi terdapat pada Instalasi Farmasi Kota Gorontalo.

Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, hasil bisa disajikan pada gambaran tabel serta diuraikan dengan cara naratif. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif berdasarkan angket dengan melihat total skor berdasarkan standar Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes, dengan skor keseluruhan >70 apabila Instalasi Farmasi tersebut melakukan pengelolaan sesuai standard an <70 apabila tidak sesuai standar.

3. Hasil dan Pembahasan

Manajemen pengelolaan obat ialah rangkaian agenda yang tersusun atas rencana, mengadakan, menyimpan, menyalurkan serta memusnahkan obat yang pengolahannya dilaksanakan dengan cara optimal untuk tercapai tepat macamnya serta banyaknya obat juga perbekalan kesehatan [11]. Pengelolaan obat sangat penting dikarenakan hal ini akan mempengaruhi stabilitas obat yang diketahui sangat rentan terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan obat menjadi rusak seperti suhu, sinar matahari, kelembaban, dan lainnya. Tujuan dilakukannya pengelolaan obat ini adalah agar dapat menyediakan obat yang berkualitas dan bermutu terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan agar pengelolaan obat dilakukan dengan baik salah satunya dengan membentuk instalasi farmasi pemerintah di masing masing daerah.

Instalasi farmasi pemerintah adalah sarana tempat penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kesehatan. Di Kota Gorontalo sendiri, pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan oleh Instalasi Farmasi Kota Gorontalo yang kemudian didistribusikan ke berbagai puskesmas yang ada di Kota Gorontalo [8].

Presentase Manajemen Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Berdasarkan data hasil penelitian yang terdapat dalam Tabel 1, terlihat bahwa jumlah skor yang didapatkan oleh Instalasi Farmasi Kota Gorontalo adalah sebesar 92,46 dari 100.

Tabel 1. Presentase manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

No	Komponen Penilaian	Skor	Standar
1.	Sumber Daya	56,06	60
2.	Pengelolaan	36,40	40
Total Skor		92,46	100

Sumber nilai standar: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017

Menurut standar minimal yang ditetapkan oleh Kemenkes [6] adalah sebesar 70 secara keseluruhan. Berdasarkan nilai ini, maka Instalasi Farmasi Kota Gorontalo secara umum telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Kemenkes. Nilai ini didapatkan dari jumlah nilai pada angket yang menjadi komponen utama penilaian terhadap instalasi farmasi yaitu penilaian terhadap komponen sumber daya mendapat skor 56,06 dan komponen pengelolaan obat yang mendapatkan skor 36,40.

Penilaian Komponen Sumber Daya

Pada angket pertama, yang menjadi penilaian adalah sumber daya yang terdapat di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo, antara lain yaitu struktur organisasi, sumber daya manusia, ketersediaan biaya operasional, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk manajemen pengelolaan obat. Untuk penilaian komponen sumber daya yang terdapat di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo, didapatkan hasil skor yaitu 56,06 dimana nilai standar Kemenkes yaitu 60 (Tabel 2).

Tabel 2. Penilaian komponen sumber daya

No	Komponen	Skor	Standar
1.	Struktur Organisasi	4,5	7,5
2.	Sumber Daya Manusia	15	15
3.	Biaya Operasional	7,5	7,5
4.	Sarana dan Prasarana	29,06	30
Total Skor		56,06	60

Sumber nilai standar: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017

Instalasi Farmasi Kota Gorontalo diketahui saat ini merupakan Seksi Farmasi yang dibawah oleh Bidang Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Berdasarkan angket yang distandarisasi oleh Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes [6], Instalasi Farmasi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan obat sebaiknya berbentuk UPTD (Unit Pelaksana Tugas Daerah) yang bertanggung jawab langsung terhadap Kepala Dinas Kesehatan, hal ini dikarenakan skor yang lebih tinggi dibandingkan masih berstatus sebagai Seksi Farmasi dibawah Bidang Kefarmasian Dinas Kesehatan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Waluyo dkk [14], mengenai faktor yang mempengaruhi pengelolaan obat publik di instalasi farmasi kabupaten, Instalasi Farmasi yang berbentuk UPTD lebih bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Sedangkan untuk Instalasi Farmasi yang masih berbentuk Seksi Farmasi di salah satu Dinas Kesehatan, memiliki tugas dan fungsi yang cukup banyak yaitu sebagai pengelola sekaligus pengawas obat yang ada di suatu Kabupaten/Kota. Sementara itu, pengelolaan obat adalah hal yang memerlukan perhatian yang lebih baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaannya.

Selain struktur organisasi, hal lain yang menjadi penilaian pada angket pertama ini adalah Sumber Daya Manusia. Instalasi Farmasi Kota Gorontalo memiliki penanggung jawab seorang apoteker, dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 11 orang yang terdiri dari Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Tata Usaha, Fungsional Apoteker, Fungsional TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian), Staf Pelaksana sebanyak 3 orang, serta Tenaga Penunjang sebanyak 4 orang.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Instalasi Farmasi Kota Gorontalo, diketahui bahwa pegawai yang terdapat di lingkungan Instalasi Farmasi memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, antara lain adalah Apoteker, Sarjana (S1), Diploma (D3), serta SMA. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk [14], dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi salah satunya adalah pendidikan personel atau pegawai yang bekerja di Instalasi Farmasi tersebut. Kepala Instalasi Farmasi sendiri merupakan seorang apoteker yang bertanggung jawab atas segala hal mengenai manajemen pengelolaan obat di Instalasi Farmasi yang dibantu oleh staff lainnya. Terdapat pula fungsional apoteker yang juga berpendidikan sebagai Apoteker. Sementara itu, untuk Tenaga Teknis Kefarmasian (Fungsional TTK) diketahui merupakan seorang sarjana kesehatan masyarakat yang berarti belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang tenaga kefarmasian [9], dijelaskan bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Solusi terhadap hal ini sebaiknya dengan memberikan tugas ini kepada tenaga kefarmasian yang berkompeten sekurang-kurangnya adalah lulusan tenaga menengah farmasi.

Untuk Biaya Operasional yang digunakan oleh Instalasi Farmasi, diketahui bahwa Instalasi Farmasi Kota Gorontalo memiliki biaya yang dibagi atas 3 bagian yaitu biaya pemeliharaan, biaya distribusi, serta biaya lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes [6], dimana setiap Instalasi Farmasi diharapkan membuat penggunaan biaya operasional menjadi 3 biaya operasional tersebut.

Sarana dan prasarana yang terdapat di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sendiri terdiri atas gedung yang merupakan milik pribadi. Gedung ini terbagi atas 2 gedung yaitu gedung administrasi atau gedung kantor dan gudang yang luas cukup untuk dapat menampung seluruh obat yang dikelola. Tersedia pula area penyimpanan umum, penyimpanan khusus, area karantina, dan area persiapan distribusi/penyerahan serta adanya area parkir yang cukup luas. Pada gedung administrasi dan pengolahan data, terdapat sarana penunjang lainnya seperti komputer/laptop, printer, aplikasi manajemen obat secara elektronik, serta modem/alat pendukung jaringan internet.

Untuk pendistribusian obat, Instalasi Farmasi memiliki kendaraan roda empat sebagai alat penyaluran obat dan perbekalan kesehatan. Di area penyimpanan obat sendiri terdapat rak, lemari khusus narkotika/psikotropika, lemari es, pallet, air conditioning (AC), generator set (genset), trolley/kereta dorong, serta thermometer ruangan. Untuk memastikan keamanan penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan, maka perlu dilakukan pengamanan. Di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sendiri telah melakukan pengamanan dengan menambahkan alat-alat keamanan seperti alarm, teralis, alat pemadam api ringan, pagar, serta dilengkapi oleh pintu ganda (non besi dan besi).

Menurut Pramukantoro dan Sunarti [10], disebutkan bahwa penyimpanan dan distribusi merupakan bagian dalam fungsi pengelolaan obat yang penting guna menjamin mutu obat yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pada Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan [6], salah satu indikator yang diperhatikan adalah sarana penyimpanan obat yang menjamin keamanan serta mutu obat. Hal ini menunjukkan sarana dan prasarana yang memadai diperlukan dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan untuk mencapai ketersediaan yang baik. Di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sendiri sarana yang digunakan sudah memadai.

Penilaian Komponen Pengelolaan Obat

Pengelolaan obat yang harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes [6] terdiri dari kegiatan perencanaan, pengadaan dan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan dan pelaporan, supervisi dan evaluasi, pemusnahan, serta pengembangan kompetensi. Berdasarkan hasil yang diteliti, Instalasi Farmasi Kota Gorontalo memiliki skor 36,40 dengan standar Kemenkes yaitu 40 (Tabel 3).

Tabel 3. Penilaian komponen pengelolaan obat

No	Komponen	Skor	Standar
1.	Perencanaan	3	6
2.	Penerimaan	5	5
3.	Penyimpanan	5,4	6
4.	Distribusi	6	6
5.	Pencatatan dan Pelaporan	6	6
6.	Pemusnahan	5	5
7.	Pengembangan Kompetensi	6	6
Total Skor		36,4	40

Sumber nilai standar: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017

Penilaian pertama yang dilakukan terhadap pengelolaan obat adalah terhadap proses perencanaan obat yang ada di Instalasi Farmasi. Berdasarkan angket, ada beberapa hal yang perlu dinilai yaitu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai perencanaan obat, adanya SK Tim Rancangan Obat Terpadu (TPOT), serta rancangan kerja dan manfaatnya bagi TPOT. Dari beberapa hal tersebut, Instalasi Farmasi Kota Gorontalo hanya memiliki SOP mengenai perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan ini, Instalasi Farmasi Kota Gorontalo belum menjalankan perencanaan yang maksimal atau sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes, ini terlihat dari jumlah skor yang didapatkan pula yaitu sebesar 3,00 dari standar yang

seharusnya 6,00. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Instalasi Farmasi Kota Gorontalo adalah perlu menetapkan SK untuk Tim Rancangan Obat Terpadu serta memiliki rencana kerja dan manfaatnya. Dengan adanya hal ini akan lebih memaksimalkan dalam merencanakan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, sehingga pengelolaan obat dapat berjalan dengan lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rumbay dkk [12], disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi perencanaan salah satunya adalah penggunaan data yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan obat yang diperlukan. Di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sendiri, data yang digunakan untuk perencanaan obat antara lain berasal dari permintaan Puskesmas yang ada di Kota Gorontalo. Untuk daftar obat yang akan disediakan, biasanya dilakukan rapat terlebih dahulu untuk menentukannya dengan pertimbangan berdasarkan pada LPLPO yang diterima dari Puskesmas, Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), formularium nasional, daftar obat indikator yang dikeluarkan oleh kemenkes, serta obat-obatan program.

Berdasarkan data perencanaan obat yang didapatkan dari Instalasi Farmasi Kota Gorontalo pada tahun 2020, ada 412 obat dan vaksin yang disediakan oleh instalasi farmasi dan kemudian akan dibagikan ke fasilitas kesehatan yang ada di Kota Gorontalo. Proses pemilihan kebutuhan obat ini dilakukan secara berjenjang. Pertama, penyediaan data pemakaian obat setiap bulan disediakan oleh Puskesmas dengan melampirkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Melalui laporan ini, kemudian Instalasi Farmasi akan menjumlahkan kebutuhan obat yang dibutuhkan berdasarkan banyaknya pemakaian obat yang digunakan perbulan oleh masing-masing puskesmas. Perhitungan kebutuhan obat yang dibutuhkan secara keseluruhan kemudian dihitung menggunakan metode konsumsi dengan melihat data, lalu dilakukan penyusunan dana yang dibutuhkan untuk pengadaan obat yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Proses kemudian diakhiri dengan penetapan hasil perencanaan obat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Setelah proses perencanaan obat telah selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah proses pemesanan obat melalui aplikasi. Obat yang dipesan adalah obat yang terdapat pada *e-katalog* maupun non *e-katalog*. Kemudian obat yang telah dipesan tersebut akan dikirimkan oleh distributor.

Kegiatan pengelolaan obat yang dilakukan selanjutnya adalah penerimaan obat. Pada kegiatan penerimaan obat, hal hal yang menjadi penilaian adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), terdapatnya buku terima obat, staf yang diberikan tanggung jawab untuk penerimaan obat, pemeriksaan kesesuaian obat yang dikirim dengan daftar dokumentasi pengiriman obat, serta pemeriksaan keadaan kemasan dan ekspire obat. Berdasarkan penilaian ini, Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sejauh ini telah melakukannya dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk nilai yang didapatkan pun yaitu 5,00 dari standar 5,00. Dengan demikian bisa dikatakan untuk proses penerimaan obat, sudah tidak terdapat masalah dan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes.

Setelah obat selesai dilakukan pengecekan saat penerimaan obat, maka obat kemudian akan disimpan terlebih dahulu di gudang obat instalasi farmasi untuk selanjutnya akan didistribusikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kota Gorontalo. Obat yang telah diterima di simpan di gudang penyimpanan obat Instalasi Farmasi dengan memperhatikan standar penyimpanan setiap obat yang telah diterima. Seperti menjaga suhu yang sesuai dengan stabilitas obat, memperhatikan pertukaran

udara di dalam ruang penyimpanan, menjaga kebersihan serta kerapian ruang penyimpanan, bebas serangga, penerangan yang cukup memadai, penyimpanan obat expired yang terpisah dari obat lainnya, obat-obat khusus seperti psikotropika dan narkotika disimpan tersendiri pada lemari khusus, serta perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan untuk menjaga obat agar tidak mudah rusak selama penyimpanan obat. Pada ruang penyimpanan, terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti rak, lemari khusus narkotika dan psikotropika, lemari es, pallet, AC, generator set, trolley/kereta dorong, serta thermometer ruangan. Pengelolaan dan penyimpanan obat semuanya dilakukan secara satu pintu (*one gate policy*) oleh Instalasi Farmasi Kota Gorontalo.

Berdasarkan angket yang dikeluarkan oleh Kemenkes [6], ada beberapa poin yang menjadi penilaian terhadap penyimpanan obat di Instalasi Farmasi, yaitu adanya SOP penyimpanan obat, ruangan penyimpanan yang rapi dan bersih, terhindar dari hewan pengerat dan serangga, ventilasi serta sirkulasi udara dan pencahayaan yang menunjang, pemisahan terhadap obat yang telah kadaluarsa, penataan stok obat memerhatikan tanggal kadaluarsa, tersedia ruang yang cukup untuk bergerak, pengelompokan obat berdasarkan jenis peruntukkan (obat program dan non program) dan bentuk sediaan serta disusun secara alfabetis, serta dilakukannya pengamatan mutu obat secara organoleptis dan dicatat dalam buku penyimpanan obat. Dari poin-poin yang telah disebutkan tersebut, Instalasi Farmasi Kota Gorontalo telah melakukan semua yang menjadi poin standar penilaian terhadap penyimpanan obat, kecuali pada poin pengamatan mutu obat secara organoleptis dan dicatat dalam buku penyimpanan. Pada poin ini, instalasi farmasi tidak melakukannya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Uji Mutu Obat pada Instalasi Farmasi Pemerintah [8] dikatakan bahwa perlu dilakukan pengujian terhadap mutu obat yang ada di Instalasi Farmasi Pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pemastian mutu obat yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dimana pengujian mutu obat ini meliputi pengujian terhadap semua jenis obat terutama obat yang tercantum dalam formularium nasional dan obat program kesehatan. Pentingnya pengujian obat ini bukanlah tanpa sebab, tetapi dimaksudkan agar kualitas obat yang akan diterima masyarakat adalah obat yang berkualitas baik. Menurut Waluyo dkk [14], disebutkan bahwa pengawasan terhadap mutu obat yang disimpan di Instalasi Farmasi perlu untuk dilakukan agar dapat mencegah terjadinya obat stagnan dan kerusakan pada obat. Pemantauan mutu obat secara berkala ini juga dapat mencegah terjadinya penumpukan obat kadaluarsa, sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan obat. Solusi yang dapat diberikan terhadap masalah ini yaitu Instalasi Farmasi Kota Gorontalo perlu melakukan pemantauan mutu obat dengan menunjuk staf khusus untuk pemantauan mutu obat.

Tahapan selanjutnya yaitu tahap distribusi. Penilaian yang dilakukan terhadap tahap ini yaitu meliputi adanya SOP, adanya petugas distribusi, adanya jadwal distribusi, tersedianya dokumen penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, tersedianya sarana repacking seperti kardus maupun plastik obat, serta memperhitungkan stok optimum. Berdasarkan beberapa poin penilaian tersebut, Instalasi Farmasi Kota Gorontalo telah memenuhi seluruh poin penilaian dan mendapatkan nilai 6,00 dari standar 6,00. Hal ini menunjukkan bahwa Instalasi Farmasi Kota Gorontalo telah melaksanakan proses distribusi obat yang baik dan benar sesuai standar Kemenkes.

Distribusi obat dari Instalasi Farmasi ke Puskesmas yang ada di Kota Gorontalo dilakukan setiap bulan. Tahapan distribusi yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi terbagi atas beberapa tahapan yaitu persiapan administrasi, penyiapan obat dan distribusi, dan stok opname. Pertama yaitu persiapan administrasi. Pada penyiapan administrasi dimulai dengan penerimaan LPLPO yang didapatkan dari Puskesmas yang ada di Kota Gorontalo. Lalu akan dilakukan penyiapan berkas administrasi seperti surat tugas, surat bukti barang keluar, pembuatan jadwal pendistribusian, dan kelengkapan administrasi lainnya. Kedua yaitu penyiapan obat dan distribusi. Setelah melakukan penyiapan administrasi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah penyiapan obat yang akan didistribusikan sesuai LPLPO yang diberikan oleh Puskesmas. Pada tahap ini, obat-obat yang akan didistribusikan akan dilakukan pengecekan, seperti pengecekan tanggal kadaluwarsa obat, pengecekan kesesuaian obat yang disiapkan dengan yang tertulis pada LPLPO, serta pengecekan jumlah obat yang akan dikirimkan. Perlu disiapkan juga Berita Acara Serah Terima obat serta Surat Bukti Barng Keluar sehingga dapat dilihat berapa banyak obat yang didistribusikan. Setelah seluruh pengecekan, maka obat akan dilakukan pengepakan untuk selanjutnya dikirimkan ke berbagai puskesmas. Penyerahan obat dilakukan beserta dengan Surat Bukti Barang Keluar dan Berita Acara Serah terima kepada petugas puskesmas. Semua kegiatan serta dokumen distribusi obat kemudian diarsipkan. Setelah kegiatan distribusi, maka perlu dilakukan pengecekan obat serta BMHP dengan melakukan stok opname logistik kesehatan yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo.

Penilaian selanjutnya yaitu terhadap proses pencatatan dan pelaporan. Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sendiri telah memenuhi standar Kemenkes dengan nilai 6,00. Dalam proses manajemen obat dan perbekalan kesehatan, maka perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan terkait kegiatan manajemen obat dan perbekalan kesehatan yang dilakukan. Instalasi Farmasi melakukan pencatatan dan pelaporan menggunakan sistem yang terintegrasi dan terhubung ke berbagai lembaga terkait. Pelaporan mutasi dan persediaan obat dilakukan oleh Instalasi Farmasi ke Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Badan Keuangan Kota Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan Kementerian Kesehatan. Pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan sebenar-benarnya dengan menyesuaikan stok obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia di Instalasi Farmasi.

Proses manajemen pengelolaan obat selanjutnya adalah pemusnahan obat. Berdasarkan angket yang dikeluarkan oleh Kemenkes, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam pemushanan obat yaitu meliputi adanya SOP, adanya petugas Instalasi Farmasi yang terlibat dalam pemusnahan obat, serta adanya berita acara pemusnahan obat. Instalasi Farmasi Kota Gorontalo sudah memenuhi seluruh kriteria tersebut dan mendapatkan nilai 5,00 dari standar kemenkes yaitu 5,00. Dengan demikian pada proses pemusnahan obat ini, instalasi farmasi telah memenuhi standar Kemenkes. Obat-obat yang telah rusak, kadaluwarsa, maupun obat-obat yang ditarik dari pasaran dan perlu dilakukan pemusnahan akan dikumpulkan terlebih dahulu di Instalasi Farmasi untuk kemudian dimusnahkan setiap tahun sekali pada minggu pertama bulan Desember.

Hal penting lainnya yang menjadi penilaian terhadap suatu Instalasi Farmasi berdasarkan angket yang dikeluarkan oleh Kemenkes adalah pengembangan kompetensi. Penilaian yang dilakukan meliputi pembimbingan teknis pada puskesmas serta melakukan pertemuan koordinasi dengan puskesmas. Instalasi Farmasi Kota

Gorontalo sendiri telah melakukan pengembangan kompetensi ini dan mendapatkan nilai 6,00 dari standar Kemenkes yaitu 6,00. Pembimbingan teknis ke puskesmas ini dimaksudkan agar Instalasi Farmasi dapat memberikan bimbingan mengenai pengelolaan obat yang baik dan benar ke puskesmas yang ada di suatu daerah sehingga tata kelola obat di berbagai puskesmas juga berjalan dengan baik. Selain itu pertemuan koordinasi dengan puskesmas juga dilakukan agar dapat menjalin koordinasi yang baik antara Instalasi Farmasi dan Puskesmas sehingga penyaluran obat dapat diketahui dan terkendali dengan baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Manajemen Pengelolaan Logistik Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan di Instalasi Farmasi Kota Gorontalo yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Pengadaan dan penerimaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Penyimpanan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Pendistribusian sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Pemusnahan sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Kemenkes.

Referensi:

- [1] Anief, Moh. 1995. *Manajemen Farmasi*. Cet ke-1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- [2] Depkes RI. 1996. *Buku Petunjuk Pedoman Pengelolaan Gudang Penyimpanan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- [3] Depkes RI. 2003. *Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- [4] Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. 2017. *Profil dan Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo*. Gorontalo: Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
- [5] Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 2010. *Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- [6] Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017. *Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- [7] Permenkes RI No. 3 Tahun 2015, tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi*
- [8] Permenkes RI No. 75 Tahun 2016, tentang *Penyelenggaraan Uji Mutu Obat Pada Instalasi Farmasi Pemerintah*
- [9] Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009, tentang *Pekerjaan Kefarmasian*
- [10] Pramukantoro, Ganet Eko dan Sunarti. 2018. *Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2015*. Jurnal Farmasi Indonesia, Vol. 15
- [11] Rosmania, F.A dan Supriyanto, S. 2015. *Analisis Pengelolaan Obat Sebagai Dasar Pengendalian Safety Stock Pada Stagnant Dan Stockout Obat*. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Airlangga. Vol 3.

- [12] Rumbay, Ingrid N., G. D. Kandou, dan T. Soleman. 2015. *Analisis Perencanaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5
- [13] Syamsuni, H. A. 2006. *Ilmu Resep*. Jakarta : EGC
- [14] Waluyo, Yohanes Wahyu, Umi Athiyah, Thinni Nurul Rochmah. 2015. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Obat Publik di Instalasi Farmasi Kabupaten (Studi di Papua Wilayah Selatan)*. Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, Vol. 13
- [15] Warman, Jhon. 1997. *Manajemen Pergudangan*. Jakarta: LPPM.